bpr dana mandiri bogor

BPR DANA MANDIRI BOGOR

Passion - Integrity - Teamwork - Respect - Excelent

LAPORAN TATA KELOLA 2021

Form A.00.00

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Dana Mandiri Bogor
Posisi Laporan	:	31 Desember 2021
Alamat	:	Jl. Raya Veteran III Ruko Mutiara Residence Kav 1 & 2 Desa Banjarwaru Kec. Ciawi Kab. Bogor
Nomor Telepon	:	(0251) 8292814
Penjelasan Umum	:	BPR Dana Mandiri Bogor merupakan BPR yang berada di Kabupaten Bogor dengan fokus penyaluran kredit khusus kepada perempuan yang memiliki usaha produktif dengan sistem kelompok. Penerapan tata kelola di BPR sudah dilakukan, diantaranya pemenuhan organ perusahaan, tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK, benturan kepentingan dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan berdasarkan modal inti.

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Risdianto Sudarno	Direktur Utama	Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola.
2	Rima Melati	Direktur	Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola.
3	Yuda Pramono	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
Jabatan 0200 bertanggung jawab terhadap pencapaian penyaluran kredit dan kualitas kredit.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Jabatan 0201 bertanggung jawab terhadap operasional BPR dan memastikan BPR patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Form A.01.20
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Benyamin Tadian	Komisaris Utama	Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2	Hani Handayani Indrakesuma	Komisaris	Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Rekomendasi Kepada Direksi
Footer 1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 2

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Form A.01.33

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Dana Mandiri Bogor
Posisi Laporan	:	31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Form A.03.10
Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Risdianto Sudarno	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rima Melati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Yuda Pramono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Risdianto Sudarno	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rima Melati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
3	Yuda Pramono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Hani Handayani Indrakesuma	PT. Dana Mandiri Sejahtera	2,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Benyamin Tadian	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Hani Handayani Indrakesuma	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.05.20
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Benyamin Tadian	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Hani Handayani Indrakesuma	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	1291284000	2	411802800
2	Tunjangan	3	75600000	2	24000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		1366884000		435802800

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.06.20
Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	KPR	-
2	Transportasi	COP	COP
3	Asuransi Kesehatan	CAR	CAR
4	Fasilitas lainnya	Lainnya	Lainnya

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Fasilitas lainnya berupa asuransi jiwa dan tunjangan komunikasi.

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10,71	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,28	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,20	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,65	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	18-02-2021	5	Rapat Dewan Komisaris Triwulan 1
2	10-06-2021	5	Rapat Dewan Komisaris Triwulan 2
3	12-08-2021	5	Rapat Dewan Komisaris Triwulan 3
4	11-11-2021	5	Rapat Dewan Komisaris Triwulan 4

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dalam setiap rapat Dewan Komisaris, topik/materi pembahasan adalah Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis, evaluasi/penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi RBB dan penerapan APU dan PPT di BPR sesuai dengan kondisi BPR pada saat pelaksanaan rapat.

Form A.08.20
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Benyamin Tadian	4	0	100,00
2	Hani Handayani Indrakesuma	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Selama tahun 2021 rapat dewan komisaris dilakukan secara tatap muka.

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	4	0	3
Telah Diselesaikan		0		0		3		2
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	1
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR	:	PT. BPR Dana Mandiri Bogor
Posisi Laporan	:	31-12-2021
Alamat	:	Jl. Raya Veteran III Ruko Mutiara Residence Kav 1 & 2 Desa Banjarwaru Kec. Ciawi Kab. Bogor
Nomor Telepon	:	(0251) 8292814
Modal Inti BPR	:	42.765.841.621,00
Total Aset BPR	:	276.269.633.779,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,3
Peringkat Komposit	:	1
Analisis	:	a. Kekuatan penerapan tata kelola BPR antara lain:1. Pedoman tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sudah dibuat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada pedoman yang sudah ada.2. Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit 4 kali dalam setahun dan berjalan dengan efektif.3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yang dapat merugikan BPR.4. Direksi sangat kompeten terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit eksternal dan internal.6.Audit Ekstern terdaftar di kantor Otoritas Jasa Keuangan, penunjukkan dilakukan melalui RUPS dan rekomendasi Dewan Komisaris.7.Sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pegawai yang bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi.8.Dengan adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diharapkan kepatuhan BPR terhadap ketentuan-ketentuan OJK dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan BPR menjadi lebih baik.9.Dengan adanya Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen resiko diharapkan pengelolaan risiko dalam kegiatan operasioanal dapat berjalan dengan efektif dan efesien.b. Kelemahan penerapan tata kelola BPRBPR belum melakukan review SOP Manajemen risiko dan penetapan limit, BPR akan mengoptimalkan penerapan manajemen resiko secara penuh karena sudah ada penunjukkan pejabat eksekutif yang membawahi fungsi manajemen risiko.BPR akan berusaha melakukan identifikasi, pengukuran risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh BPR dengan mengacu pada ketentuan tentang penerapan manajemen risiko bagi BPR. Diharapkan dengan langkah tersebut, BPR dapat melakukan mitigasi-mitigasi yang tepat untuk mengurangi potensi risiko yang akan ditanggung BPR.

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,40	0,12	1,02	0.204	Direksi sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sangat baik dalam upaya pengembangan BPR dan penerapan tata kelola di BPR.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,55	0,10	1,21	0.182	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan sudah dilakukan dengan baik, Dewan Komisaris selalu memberikan nasehat dan masukan kepada Direksi
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR belum wajib membentuk Komite-komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,40	0,20	1,60	0.160	BPR selalu menghindarkan terjadinya benturan kepentingan, Dalam hal terjadi benturan kepentingan selalu diungkap dalam setiap keputusan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,60	0,56	0,17	1,33	0.133	Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR sudah dilakukan dengan baik. Berdasarkan Pemeriksaan OJK dan KAP pelanggaran relatif turun dan hanya bersifat administratif
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,60	0,70	0,13	1,43	0.143	Pelaksanaan Fungsi Audit sudah memadai dan independen sesuai dengan kompleksitas usaha BPR
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern dilakukan sudah sangat baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	0,68	0,10	1,95	0.195	Saat ini BPR telah menerapkan manajemen risiko secara penuh, namun SOP manajemen risiko dan penetapan limit risiko masih dalam proses penyusunan.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	BPR tidak melanggar atau melampaui Batas maksimum pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan, Rencana bisnis disusun sesuai dengan ketentuan OJK
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan OJK
Nilai Komposit						1.3	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Direksi berjumlah 3 orang, Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperoleh Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	1 Direksi bertempat tinggal di kabupaten di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan 2 Direksi bertempat tinggal di kabupaten di provinsi yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Direksi atau Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Konsultan hanya digunakan untuk proyek-proyek khusus dan didasari dengan kontrak kerja.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Semua anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Anggota Direksi hanya memberikan Kuasa Khusus Terbatas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Temuan Audit sudah dilakukan tindak lanjut.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Data dan informasi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan rapat Direksi selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi hanya menerima remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan di RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Pelatihan rutin selalu diberikan kepada seluruh karyawan baik secara internal maupun eksternal
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi sangat kompeten terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Pedoman Direksi sudah ada serta dilaksanakan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Laporan pertanggungjawaban tugas Direksi selalu dilakukan melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan mengenai kepegawaian telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Risalah Rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Kinerja BPR meningkat sesuai dengan ekspektasi stakeholders
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan penerapan tata kelola akan disampaikan kepada OJK dan Pihak pihak lain sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,12	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.02.00
Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Komisaris 2 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Komisaris 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Semua komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Komisaris bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kantor pusat BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti dibawah 50 milyar
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Pedoman Dewan Komisaris sudah ada serta dilaksanakan dengan baik
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan sesama Komisaris atau Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan Direksi atau Komisaris lain.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan temuan audit telah ditindaklanjuti
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara rutin

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis dilakukan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan laporan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,55	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Selalu dibuat Risalah rapat Dewan Komisaris dan softcopy dibagikan ke Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.04.00
Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Kebijakan benturan kepentingan telah disusun oleh BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan selalu diungkap dalam setiap keputusan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.05.00
Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain terkait perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Selalu dilakukan evaluasi kebijakan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Kebijakan sudah disusun
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi ketentuan OJK dan ketentuan lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terus berupaya mendorong budaya kepatuhan BPR termasuk sosialisasi ketentuan terkini baik ketentuan internal maupun eksternal.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu melakukan pemantauan terhadap pemenuhan komitmen kepada OJK
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR sesuai dengan Ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Dilakukan reviu rutin oleh fungsi kepatuhan jika terdapat perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,56	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	Berdasarkan Pemeriksaan OJK dan KAP pelanggaran relatif turun dan hanya bersifat administratif

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan secara berkala.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ditemukan penyimpangan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. BPR selalu melakukan upaya maksimal untuk menghindari hal tersebut.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.06.00
Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah ditunjuk oleh BPR
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pedoman Kerja serta sistem dan prosedur Fungsi Audit Intern sudah ada dan disesuaikan dengan ketentuan OJK dan disetujui oleh Direktur Utama dan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Fungsi Audit Intern Independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Struktur Organisasi Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Program rekrutmen dan pengembangan SDM Audit Intern mengacu pada ketentuan HRD
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Obyek Pemeriksaan Audit Intern adalah seluruh unit kerja di BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50 Milyar
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan Fungsi Audit sudah memadai dan independen sesuai dengan kompleksitas usaha BPR
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Program pelatihan untuk SDM Audit intern sudah disusun pada saat RKT dan disesuaikan dengan kebutuhan SDM
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Laporan sudah disampaikan kepada Direktur Utama dan Komisaris serta Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Audit telah disampaikan kepada OJK sebelum batas waktu yang ditentukan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50 Milyar

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Setiap pemberhentian atau pengangkatan Pejabat Eksekutif, BPR selalu menyampaikan laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan KAP dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukan dilakukan melalui RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan hasil Audit KAP dan management letter disampaikan ke OJK oleh KAP
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Sudah Sesuai dan tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan audit sudah sesuai dengan ketentuan OJK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR akan melakukan review SOP Manajemen Risiko dan penetapan Limit Risiko dan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR telah memiliki kebijakan terkait penerbitan produk dan aktifitas baru yang yang didalamnya mengatur identifikasi dan pengelolaan risiko
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Kebijakan Manajemen Risiko sudah disusun dan selalu dilakukan evalauasi terhadap setiap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Kebijakan Manajemen Risiko sudah disetujui dan selalu dilakukan evalauasi terhadap pertanggungjawaban direksi serta setiap transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	Sistem pengendalian intern sudah diterapkan secara menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan Manajemen risiko sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem Informasi Manajemen BPR sudah memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Pengembangan budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM sudah dilakukan khususnya kepada Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko sesuai ketentuan yang berlaku kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Setiap produk dan aktivitas baru yang dilakukan BPR selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.09.00
Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah Kebijakan BMPK mengacu pada ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR mengevaluasi Kebijakan BMPK secara berkala dengan tetap mengacu pada ketentuan OJK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Pemberian Kredit sesuai ketentuan BMPK OJK
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan BMPK selalu dikirim tepat waktu
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak melanggar ketentuan BMPK OJK

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis telah disusun Oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Pemegang Saham mendukung sepenuhnya rencana bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana bisnis disusun sesuai dengan ketentuan OJK
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara rutin, menyelenggarakan rapat Dekom minimal 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis BPR kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK termasuk perubahannya
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Sistem pelaporan dan sumber daya manusia sudah memadai
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sudah disusun setiap triwulanan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan disusun sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Transparansi Informasi Produk dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan disusun sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Demikian Laporan Tata Kelola tahun 2021 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 25 April 2022

PT BPR DANA MANDIRI BOGOR

Risdianto Sudarno	Benyamin Tadian
Direktur Utama	Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Dana Mandiri Bogor

Posisi : 31 Desember 2021

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
1.21	Sangat Baik (Sebelum Manajemen Risiko)
1.28	Sangat Baik (Setelah Manajemen Risiko)

Analisis

Berdasarkan hasil penilaian penerapan tata kelola BPR, dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan tata kelola di PT. BPR Dana Mandiri Bogor sudah baik, hal ini bisa dilihat dari nilai komposit yang diperoleh sebelum penerapan manajemen risiko yaitu 1.21 dan setelah penerapan manajemen risiko menjadi 1.28 dengan peringkat komposit sangat baik.

BPR terus berkomitmen menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasional perusahaan dengan berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

a. Kekuatan penerapan tata kelola BPR antara lain :
   1. Pedoman tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi sudah dibuat sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada pedoman yang sudah ada.
   2. Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit 4 kali dalam setahun dan berjalan dengan efektif.
   3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan pihak lain yang dapat merugikan BPR.
   4. Direksi sangat kompeten terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
   5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit eksternal dan internal..
   6. Audit Ekstern terdaftar di kantor Otoritas Jasa Keuangan, penunjukkan dilakukan melalui RUPS dan rekomendasi Dewan Komisaris.
   7. Sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pegawai yang bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
   8. Dengan adanya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan diharapkan kepatuhan BPR terhadap ketentuan-ketentuan OJK dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan BPR menjadi lebih baik.
   9. Dengan adanya Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen resiko diharapkan pengelolaan risiko dalam kegiatan operasioanal dapat berjalan dengan efektif dan efesien.

b. Kelemahan penerapan tata kelola BPR :

   BPR belum melakukan review atas SOP Manajemen risiko dan penetapan limit, BPR akan mengoptimalkan penerapan manajemen resiko secara penuh karena sudah ada penunjukkan pejabat eksekutif yang membawahi fungsi manajemen risiko.

   BPR akan berusaha melakukan identifikasi, pengukuran risiko atas kegiatan usaha yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan oleh BPR dengan mengacu pada ketentuan tentang penerapan manajemen risiko bagi BPR. Diharapkan dengan langkah tersebut, BPR dapat melakukan mitigasi-mitigasi yang tepat untuk mengurangi potensi risiko yang akan ditanggung BPR.

Bogor, 25 April 2022

PT. BPR Dana Mandiri Bogor

bpr dana mandiri bogor
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Dana Mandiri Bogor

Risdianto Sudarno
Direktur Utama

Benyamin Tadian
Komisaris Utama

bpr dana mandiri bogor

BPR DANA MANDIRI BOGOR

Passion - Integrity - Teamwork - Respect - Excelent